

**KELEMAHAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG
NO.32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA
LETAK SIRKUIT TERPADU**

Rr. Aline Gratika Nugrahani^{*)}.

Abstrak

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah materi baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, dimana sebelumnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia hanya mencakup Paten, Merek dan Hak Cipta. Sejak 20 Desember 2000 karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mendapatkan perlindungan dengan lahirnya Undang-undang No.32 Tahun 2000. Ada beberapa kelemahan dalam Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kelemahan tersebut antara lain mengenai prosedur pendaftaran dan mulainya jangka waktu pemberian perlindungan. Dengan keadaan seperti ini Pelaksanaan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu akan sulit ditegakkan, untuk itu perlu adanya perbaikan di dalam pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kata Kunci: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pendahuluan

Di era global, kebutuhan akan alat-alat elektronika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Alat-alat seperti radio, televisi dan komputer adalah beberapa contoh dari produk elektronika yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan. Salah satu komponen penting dari produk-produk tersebut adalah *Circuit Housed in a Platform* (CHIP). Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bertujuan melindungi "*silicon chip*" atau "Sirkuit Terpadu" yang merupakan penggerak utama kemajuan teknologi dalam dua dekade terakhir, khususnya industri komputer dan teknologi terkait. (Tim Lindsey. at.all, 2002, hal 225)

Berbarengan dengan undang-undang Rahasia Dagang, Undang-undang desain industri, dan Undang-undang varietas tanaman, undang-undang tentang Desain Tata letak sirkuit terpadu atau biasa disebut juga *Integrated Circuits* (IC) diundangkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000. Keempat Undang-undang tersebut dikeluarkan dengan latar belakang penyesuaian

^{*)} Rr. Aline Gratika Nugrahani, SH.MH adalah Dosen Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

aturan dibidang Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI, karena telah masuknya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organisation* (WTO) di mana di dalamnya diatur tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* disingkat *TRIPs* (Aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan HKI).

Lahirnya Undang-undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan upaya hukum terhadap perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, namun apabila dicermati secara lebih rinci muatan materi dari Undang-undang Desain Tata Letak sirkuit Terpadu akan terlihat beberapa kelemahan dimana kelemahan tersebut akan berpengaruh pada optimalisasi terhadap perlindungan hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Beberapa kelemahan tersebut antara lain tentang Prosedur pendaftaran dan mulainya jangka waktu perlindungan dalam hal terjadi keadaan seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pembahasan

a. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Batasan dan Ruang Lingkupnya

Undang-undang No.32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan definisi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 1 angka 2) dan pengertian Sirkuit Terpadu (Pasal 1 angka 1) adalah sebagai berikut:

“Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua inter koneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu”.

Sirkuit Terpadu adalah: “ Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”

Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu hal dapat dikatakan sebagai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu haruslah mempunyai unsur-unsur:

1. Kreasi dalam bentuk tiga dimensi yang terdiri dari elemen-elemen elektronik dimana paling sedikit mengandung satu elemen aktif ;

2. Merupakan Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi ;
3. Mampu menghasilkan fungsi elektronik.

Selain harus memenuhi unsur-unsur tersebut, sebuah Desain Tata letak Sirkuit Terpadu yang dapat diberikan perlindungan haruslah merupakan desain orisinal dari pendesain tersebut, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain artinya bukan tiruan dari karya pendesain lain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat, tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain lain artinya karya tersebut haruslah hasil dari kreatifitas pendesain dimana bagi pendesain lain merupakan suatu hal yang tidak biasa. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dapat dilindungi adalah jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut memenuhi Pasal 3 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Pada umumnya hak-hak di dalam hak kekayaan intelektual selanjutnya disingkat HKI menganut sistim perlindungan yang sama yaitu sistim *first to file* (siapa yang pertama kali mendaftar dia yang berhak) kecuali hak cipta dan hak rahasia dagang. Perlindungan dengan sistim *first to file* diberikan berdasarkan permohonan artinya perlindungan hanya akan diberikan kepada orang yang mengajukan permohonan perlindungan dalam hal ini berupa pengajuan pendaftaran haknya, jika pendaftarannya diterima hak akan diperoleh, sementara dalam sistim perlindungan hak cipta, pendaftaran tidaklah menimbulkan hak karena sejak lahirnya ciptaan maka sejak itulah hak cipta diperoleh. Lain lagi dengan rahasia dagang karena bersifat rahasia maka tidak diketahui kapan lahirnya hak tersebut sehingga tidak ada ketentuan kapan perlindungan dimulai dan jangka waktu perlindungan tidak dibatasi sampai kapan, sepanjang rahasia tersebut belum terungkap maka perlindungan masih berlangsung.

Hak-hak dalam HKI yang menganut sistim *first to file* perlindungan dimulai sejak tanggal penerimaan. Tanggal Penerimaan adalah tanggal dimana seluruh syarat-syarat administrasi permohonan telah dipenuhi dan karya-karya yang diajukan pendaftarannya dilarang untuk dipublikasikan sebelum pendaftarannya diterima karena pada saat itu belum ada perlindungan hukum.

Penggunaan Sistim *First to file* dalam perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Tersirat dalam Pasal 9 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang menyatakan bahwa: “Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar Permohonan”

b. Tata Cara Pendaftaran Desain Tata letak Sirkuit Terpadu

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 9 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 memuat tentang Tata Cara Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Secara singkat dapat diuraikan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdiri dari beberapa tahap :

1. Pemenuhan Persyaratan

- a) Permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, untuk itu telah disediakan formulir oleh Kantor Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.

1) Permohonan harus memuat antara lain :

- i. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- ii. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
- iii. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- iv. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- v. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan ;
- vi. salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
- vii. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- viii. surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
- ix. Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Terpadu.

2. Pemeriksaan Administrasi (Pemeriksaan Formil)

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10 dan Pasal 11 terhadap Permohonan (lihat

pemenuhan persyaratan No.3). Dalam Tahap ini apabila semua persyaratan telah lengkap, maka akan diberikan tanggal penerimaan, jika masih kurang persyaratannya akan diberi waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut dengan konsekuensi permohonan dianggap ditarik kembali jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan persyaratan tersebut tidak dipenuhi.

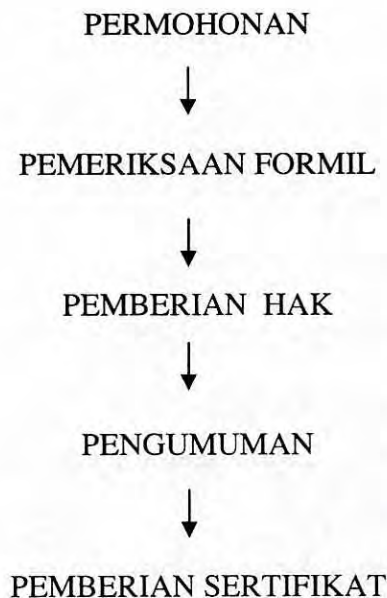
a. Pemberian Hak

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan Direktorat Jenderal mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

b. Pengumuman

Terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11, Direktorat Jenderal mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Terpadu atau sarana lain. Sarana lain itu antara lain adalah media penyimpanan misalnya CDRom dan Optical Disk

Bagan:



Bagi pendaftar yang permohonannya diterima akan mendapat perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak

tanggal penerimaan atau sejak pertama kali Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun. Yang dimaksud dengan dieksploitasi secara komersial adalah “dibuat, dijual, digunakan, dipakai, atau diedarkannya barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan”. (Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Kelemahan dalam perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan instrumen yang dapat diharapkan memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif dalam bidang HKI pada umumnya dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada khususnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dapat diukur dengan meneliti pada tataran normatif maupun implementatif.

Pada bagian ini akan diuraikan tentang beberapa kelemahan dalam Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kelemahan tersebut jelas akan membawa konsekuensi lebih lanjut terhadap implementasi dari norma-norma yang ada pada Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Permaknaan dari konsekuensi ini harus diartikan dalam konteks “*Law enforcement*” (Budi Riswandi dan M.Syamsudin, 2004, hal 58) dari Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, artinya dapat dipastikan dalam *law enforcement* terhadap Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu akan mengalami ketidak efektifan.

Ada dua kelemahan yang terkandung dalam Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dari perspektif normatif yaitu :

a. Dasar pemberian perlindungan

Pada pasal 4 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dikatakan bahwa :

- 1) Perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak Tanggal Penerimaan ;
- 2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sistim pendaftaran Paten, Merek dan Desain Industri dengan sistim perlindungan yang dianut Undang-undang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu walaupun sebenarnya sama-sama mengharuskan adanya permohonan dalam sistim perlindungannya (perlindungan dengan sistem *first to file*). Dalam sistim *First To File* sebuah karya yang belum/ sedang dimintakan perlindungan (mengajukan Permohonan) pada umumnya tidak boleh dipublikasikan terlebih dahulu sebelum pendaftaran diterima. Resiko publikasi sebelum dikabulkannya permohonan pendaftaran adalah pihak yang bersangkutan tidak dapat mengajukan gugatan jika karyanya dipakai pihak lain dan juga akan mengakibatkan gugurnya nilai baru pada karya tersebut sehingga pendaftaran kemungkinan akan ditolak.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu publikasi berupa eksploitasi secara komersil Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Yang belum didaftar tidak menyebabkan gugurnya hak mengajukan permohonan pendaftaran. Undang-undang tetap memberikan kesempatan mengajukan permohonan pendaftaran kepada karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah dieksploitasi secara komersil (dijual, dipakai, diedarkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan) dengan syarat paling lama setelah 2 tahun sejak dieksploitasi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Yang Bersangkutan harus didaftar. Dengan kondisi tersebut, maka dalam menentukan mulainya jangka waktu perlindungan didasarkan pada tanggal pertama kali dieksploitasi bagi yang melakukan eksploitasi sebelum mendaftarkan, sedangkan bagi yang langsung mengajukan pendaftaran tanpa eksploitasi didasarkan pada tanggal penerimaan.

Keadaan ini sangat menguntungkan bagi pendesain Tata letak sirkuit Terpadu, karena dengan eksploitasi terlebih dahulu pendesain akan tahu bagaimana tanggapan pasar terhadap produknya, jika tanggapannya baik dan menguntungkan, kesempatan mengajukan pendaftaran ditempuh, sehingga perlindungan akan diperoleh, dengan demikian pendesain mendapat keuntungan dan perlindungan. Hal seperti ini tidak diperoleh bagi inventor yang mengajukan paten dan pendesain dalam Desain industri, mereka harus mendaftarkan terlebih dahulu sebelum memasarkan invensinya dan produk desainnya tersebut, padahal belum tentu dapat diterima pasar, sehingga banyak diantara mereka yang tidak memperoleh keuntungan dari invensi dan desain produknya, mengingat untuk mengajukan permohonan pendaftaran diperlukan biaya

yang tidak sedikit, terutama dalam perlindungan paten terdapat biaya tahunan yang harus dibayar setiap tahunnya tanpa melihat apakah patennya laku dipasaran atau tidak.

Adapun kelemahan dari ketentuan di atas adalah bagaimana jika terdapat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sama dari pendesain yang berbeda kemudian pendesain pertama mengeksploitasi sebelum dia mendaftar kemudian pendesain yang ke dua langsung mendaftar tanpa eksploitasi terlebih dahulu, di mana waktu pendaftaran pendesain kedua adalah pada masa 2 (dua) tahun setelah eksploitasi pendesain pertama dimana pada masa itu pendesain pertama masih dapat mengajukan pendaftaran. Untuk itu diberikan ilustrasi sebagai berikut:

A dan B membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sama walaupun diantara mereka tidak saling mengenal dan masing-masing tidak meniru desain siapapun juga. A pada tanggal 2 Juni 2000 menjual karyanya disebuah pameran. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2001 A mengajukan pendaftaran untuk karya tersebut. Namun pada tanggal 18 Desember 2000 B mengajukan pendaftaran sebuah karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sama dengan karya A. Siapakah yang akan diterima pendaftarannya mengingat A masih mempunyai hak mengajukan pendaftaran selama 2 tahun sejak tanggal 2 Juni 2000.

Sangat disayangkan untuk kasus seperti diuraikan tersebut Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan solusi.

b. Prosedur pendaftaran

Kelemahan kedua dalam Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terletak pada prosedur pendaftarannya, dimana dalam prosedur pendaftaran tidak dilakukan pemeriksaan substantif, padahal syarat diterimanya sebuah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah karya yang original (asli/benar-benar dibuat oleh orang yang bersangkutan), jika tidak dilakukan pemeriksaan substantif bagaimana dapat diketahui karya tersebut original atau tidak. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif dimungkinkan terdapat penerimaan 2 atau lebih karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sama. Kelemahan prosedur pendaftaran terjadi juga pada prosedur pendaftaran Desain Industri, terlihat pada tidak adanya pelaksanaan pemeriksaan substantif jika dalam proses pengumuman tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga. Padahal dalam kenyataannya, boleh jadi suatu pengumuman terhadap permohonan desain industri itu tidak ada keberatan, dikarenakan informasi itu tidak diterima secara merata. Akibatnya dengan mekanisme seperti ini seringkali pihak Direktorat Jenderal HKI

“kecolongan” dalam pemberian hak desain industri. Desain Industri yang menurut pihak Direktorat Jenderal HKI telah memenuhi ketentuan Undang-undang Desain Industri (memiliki unsur kebaruan), namun pada kenyataannya desain industri yang telah diberikan haknya itu bukan lagi sebagai desain industri yang baru. Dalam situasi seperti ini sangat jelas perlindungan hukum terhadap desain industri yang diharapkan juga akan menjadi tidak efektif. (Budi Riswandi, M.Syamsudin, 2004, 61). Melihat apa yang terjadi dalam desain industri, hal tersebut dapat pula terjadi dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperkirakan bahwa perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta untuk membentuk alur alih teknologi yang sangat penting untuk merangsang aktifitas kreatif pendesain guna terus menerus menciptakan desain Orisinal (Penjelasan Umum Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Tidak adanya ketentuan siapa yang akan diberikan perlindungan jika terdapat 2 (dua) pendaftaran untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sama dalam masa 2 tahun setelah dilakukan eksploitasi secara komersil, dimana salah seorang telah mengeksploitasi secara komersil yang lain langsung mengajukan pendaftaran tanpa eksploitasi terlebih dahulu, keadaan seperti ini akan mempersulit pihak Dirjen HKI untuk menentukan siapa yang berhak mengajukan pendaftaran dan siapa yang akan diberi perlindungan. Kemudian melihat tidak adanya pemeriksaan substantif dalam prosedur pendaftaran dipastikan Dirjen HKI akan banyak menerima pendaftaran karya-karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak orisinal.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan yang melekat pada Undang-Undang ini, akan lebih baik apabila Undang-undang tersebut dapat direvisi dan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam untuk disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang tersebut.

Daftar Rujukan

Undang-undang No.32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Budi Agus Riswandi & M Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, Jakarta, Rajawali, 2004.

Tim Lindsey, et.all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Alumni 2002.